



**KAPUAS MULU
HEBAT!**

**RENCANA KERJA (RENJA)
PEMERINTAH DAERAH
KECAMATAN EMBALOH HILIR
TAHUN 2024**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Embaloh Hilir Tahun 2024 dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan.

Mendasari ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Acara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholders* terhadap Kabupaten Kapuas Hulu. Rencana Kerja Kecamatan Embaloh Hilir Tahun 2024 disusun dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024.

Atas tersusunnya Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kepeduliannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.



Nanga Embaloh, 12 Desember 2023

CAMAT EMBALOH HILIR,

M.NASHARUDDIN, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19681128 199503 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Embaloh Hilir mempunyai kegiatan yang prioritas dalam mendukung program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen program dan kegiatan yang secara substansial penerjemahan dari visi dan misi Bupati terpilih yang telah tertuang dalam TRANSISI RENSTRA 2024 - 2026 Kecamatan Embaloh Hilir dan telah tertuang juga dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2024, yang mana ini merupakan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Transisi Rencana Strategis 2024 – 2026 Kecamatan Embaloh Hilir.

Penyusunan Dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah, sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan Rencana Kerja yang berpedoman pada Transisi Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan.
4. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

[illegible]

RENCANA KERJA KECAMATAN EMBALOH HILIR TAHUN 2024

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Embaloh Hilir Tahun 2024, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Ecaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Acara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031.
20. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uraian Tugas Jabatan Pada Pemerintah Kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Embaloh Hilir tahun 2024 adalah memperbaiki arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Embaloh Hilir guna memperbaiki rencana kerja satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maupun

oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat

1.3.2 Tujuan

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Embaloh Hilir Tahun 2024, meliputi :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun Lalu

Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah serta Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah

Menjelaskan Program dan Kegiatan beserta besaran dana program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

BAB V Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Embaloh Hilir sampai dengan Tahun 2023 (Tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Embaloh Hilir pada Rencana Kerja yang lalu dapat kita lihat pada pencapaian kinerja Transisi Rencana Strategis 2024 – 2026 adalah sesuai tabel berikut :

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Kinerja OPD Kecamatan Embaloh Hilir apabila dinilai berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan capaian renstra sudah cukup baik dilihat dari persentase capaian kegiatan karena sebagian besar kegiatan telah terlaksana dengan baik. Pada Penyusunan Renja OPD Kecamatan Embaloh Hilir Tahun 2024 ini telah mensinkronisasikan dengan visi misi Kabupaten Kapuas Hulu terpilih tahun 2020 - 2024. Kecamatan mendukung pencapaian visi dan misi tersebut. Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD penyebabnya terdiri dari banyak faktor baik berupa hal-hal yang bersifat internal dari OPD kecamatan itu sendiri maupun hal-hal lain yang tidak dapat dikontrol sebagai faktor eksternal.

Permasalahan yang terjadi pada tugas pokok dan fungsi Pelayanan pada Kecamatan Embaloh Hilir dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan terkait Sekretariat

- a) Masih kurangnya SDM aparatur administrasi di kecamatan dan Kelurahan;
- b) Proporsi dan distribusi SDM yang kurang berimbang;
- c) Masih kurangnya Sarana operasional serta ruang/gedung yang terkait pelayanan publik;

- d) Rendahnya kompetensi SDM dalam bidang perencanaan, pengelolaan, administrasi keuangan dan penguasaan teknologi informasi;
- b. Permasalahan terkait Bidang Tata Pemerintahan**
 - a) Kurangnya SDM aparatur Kecamatan dibidang pengelolaan Pemerintahan, pengelolaan data Desa, pengelola data kependudukan dan pertanahan.
 - b) masih kurang aktifnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, sehingga banyak dari masyarakat yang masih enggan berurusan ke Kecamatan dalam hal pelayanan pemerintahan.
 - c) Peran serta para pemuda dalam organisasi dilingkungan Kecamatan belum begitu signifikan.
- c. Permasalahan terkait Bidang Seksi Pelayanan Umum**
 - a) Kurangnya SDM aparatur Kecamatan dibidang sosialisasi tentang Pelayanan administrasi publik.
 - b) Belum adanya Standar Operasional Prosedur yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Permasalahan terkait Bidang Pembangunan**
 - a) Masih banyaknya aspirasi masyarakat yang belum terakomodir dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan Embaloh Hilir.
 - b) Belum adanya sinkronisasi proses perencanaan yang ada di Desa dengan pihak Kecamatan.
- e. Permasalahan terkait Bidang Seksi Kesejahteraan Rakyat**
 - a) Kurangnya kualitas SDM dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan data kesejahteraan masyarakat.
- f. Permasalahan terkait Bidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
 - a) Masih Kurangnya pengawasan dalam bidang keamanan dan ketertiban umum
 - b) Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam pengendalian keamanan dan ketertiban

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kecamatan Embaloh Hilir adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Embaloh Hilir Tahun 2022

No	Sa sa ra n	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	-	070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ASN yang memenuhi standar Kompetensi /Kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	100		100		100		0	0	0	0	100		100		SEKRETARIS CAMAT	
				Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi	100	0	0		0		0		0		0		0		SEKRETARIS CAMAT	
				Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan: %)	100	0	0		0		0		0		0		0		SEKRETARIS CAMAT	
				Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan: %)	100	0	0		0		0		0		0		0		SEKRETARIS CAMAT	
		7.01.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran,	Jumlah Laporan Keuangan perangkat															KASUBBAG PROGRAM	

			dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Daerah (Dengan Satuan : laporan)														DAN KEUANGAN
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Keuangan perangkat Daerah (Dengan Satuan : laporan)		782.500		0	0	0	0	0	782.500	100	782.500			KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
		7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Keuangan perangkat Daerah (Dengan Satuan : laporan)		1.032.500		0	0	0	0	0	1.032.500	100	1.032.500			KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
2		07.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan perangkat Daerah (Dengan Satuan : laporan)	1													KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
3		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: Orang /bulan)	14	1.292.420.074		196.888.853		632.839.864		985.517.518	1.282.264.857	100	1.282.264.857	0	0	KASUBBAG UMUM DAN APARATUR
4		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Laporan)	5	71.940.000		17.985.000		35.970.000		53.955.000	71.940.000	100	71.940.000	0	0	KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
2		07.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Jumlah Paket Pakaian Dinas	14													KASUBBAG UMUM DAN APARATUR
5		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang Disediakan (Dengan Satuan : Stell)	14	11.050.000	0	11.050.000		11.050.000		11.050.000	11.050.000	100	11.050.000	0	0	KASUBBAG UMUM DAN APARATUR
2		07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan paket kegiatan perangkat Daerah(Dengan Satuan : laporan)	6													KASUBBAG UMUM DAN APARATUR
6		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)		2.859.000		676.000		1.542.000		2.398.000	2.859.000	100	2.859.000	0	0	KASUBBAG UMUM DAN APARATUR

7		7.01.01.2 .06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)		1.530.000		565.000		765.000		1.330.000		1.530.000	100	1.530.000		KASUBBAG UMUM DAN APARATUR
8		7.01.01.2 .06 05	Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)		3.306.200		953.400		1.844.800		2.693.200		3.306.200	100	3.306.200		KASUBBAG UMUM DAN APARATUR
9		7.01.01.2 .06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan : Laporan)		86.200.000		20.520.000		44.555.000		66.030.000		86.200.000	100	86.200.000		KASUBBAG UMUM DAN APARATUR
2		07.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan paket kegiatan perangkat Daerah (Dengan Satuan : laporan)	1													KASUBBAG UMUM DAN APARATUR
		7.01.01.2 .07. 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dengan Satuan : Unit)	1	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KASUBBAG UMUM DAN APARATUR
10		7.01.01.2 .07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan : Unit)		37.400.000		37.400.000		37.400.000		37.400.000		37.400.000	100	37.400.000		KASUBBAG UMUM DAN APARATUR
2		07.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan paket kegiatan perangkat Daerah (Dengan Satuan : laporan)	1													KASUBBAG UMUM DAN APARATUR
11		7.01.01 .2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)		1.800.000		804.000		1.020.000		1.464.000		1.800.000	100	1.800.000		
12		7.01.01 .2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)		6.800.000		1.850.000		3.300.000		4.950.000		6.800.000	100	6.800.000		

13		7.01.01 .2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)		174.270.100		47.053.600		89.505.100		130.264.200		174.270.100	100	174.270.100			
14		7.01.01. .2.09.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan paket kegiatan perangkat Daerah (Dengan Satuan : laporan)	1														KASUBBAG UMUM DAN APARATUR
15		7.01.01. .2.09.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan :Unit)		26.918.100		15.442.200		11.649.300		18.186.700		26.918.100	100	26.918.100			KASUBBAG UMUM DAN APARATUR
17		7.01.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan laporan)		4.380.000		3.285.000		2.190.000		3.285.000		4.380.000	100	4.380.000			KASUBBAG UMUM DAN APARATUR
2		7.01.02.2 .02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
18		7.01.02. 2.02.03	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan : Laporan)	1														KASUBBAG UMUM DAN APARATUR
19		7.01.02	Peningkatan Efektipitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (20.000.000		0,00		0,00		10.000.000		20.000.000	100	20.000.000			KASUBBAG UMUM DAN APARATUR

			Kecamatan	Dengan Satuan :Laporan)														
		7.01.03	Peningkatan Efektipitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan :Laporan)		10.916.000		2.803.000		5.563.000		8.286.000		10.916.000	100	10.916.000		
2		7.01.03.2 .03	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
		7.01.03.2 .01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa															
20		7.01.03.2 .01.01	Peningkatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan di Kelurahan (Dengan Satuan : Lembaga Kemasyarakatan)	1	5.674.800		0,00		5.674.800		5.674.800		5.674.800	100	5.674.800		KASUBBAG UMUM DAN APARATUR
		7.01.03.2 .03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan															
		7.01.03.2 .03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan di Kelurahan (Dengan Satuan : Lembaga Kemasyarakatan)		110.000.000		0,00		110.000.000		110.000.000		110.000.000	100	110.000.000		KASUBBAG UMUM DAN APARATUR

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Embaloh Hilir
Kabupaten Kapuas Hulu

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Indek Kepuasan Masyarakat	Angka		83	84	84	85	85	85
2.	Predikat SAKIP			BB	BB	BB	BB	BB	BB

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Tujuan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Embaloh Hilir dalam Rencana Kerja merupakan penjabaran dari pernyataan misi, dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan prioritas Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Embaloh Hilir adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang dilakukan terhadap seluruh Desa secara berkesinambungan Peningkatan kualitas administrasi, meliputi peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat diwilayah kecamatan Embaloh Hilir. Yang mana hal ini berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Embaloh Hilir.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Embaloh Hilir dalam kurun waktu tahun 2024-2026

sebagai berikut:

Rumusan Tujuan

No	Isu Strategis	Tujuan
1	2	3
1	Rendahnya tingkat keaktifan Lembaga Kemasyarakatan.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Embaloh Hilir
2	Masih Rendahnya Pemahaman Perihal Penegakan PERDA	
3	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan pemerintahan kecamatan.	
4	Pelayanan Publik	
5	Pembangunan infrastruktur	

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Kecamatan Embaloh Hilir yang diperoleh dari pencapaian outcome program Kecamatan Embaloh Hilir. Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Embaloh Hilir yang akan dicapai adalah

**“Terselenggaranya Pelayanan Publik di Kecamatan Embaloh Hilir” dan
“Terselesaikannya Permasalahan dan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Embaloh Hilir

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun		
						2022/2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Embaloh Hilir		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Embaloh Hilir	PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	%	BB	BB	BB	BB
		Terselenggaranya Pelayanan Publik di Kecamatan Embaloh Hilir	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Embaloh Hilir	Jumlah Surat Keterangan atau Rekomendasi dan Lain- lain yang Dikeluarkan oleh Kecamatan Tahun Berkenaan/ Jumlah Permintaan Surat Keterangan Atau Surat Rekomendasi dan Lain-lain Dari Masyarakat yang Diterima Tahun Berkenaan x 100 %	100 %	83			
		Terselesaikannya Permasalahan dan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Embaloh Hilir	Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani	Jumlah permasalahan di masyarakat yang ditindaklanjuti tahun berkenaan / Jumlah permasalahan atau laporan pengaduan masyarakat yang terjadi tahun berkenaan x 100 %	100,2 %	83			

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan, hingga sub kegiatan. Penyusunan program dan kegiatan Tahun 2024 mengacu pada peraturan berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dengan adanya keputusan menteri ini, praktis seluruh nomenklatur program maupun kegiatan yang disusun dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam dokumen RPJMD) mengalami perubahan dan perlu dilakukan penyesuaian dalam bentuk reklasifikasi dan rekodefikasi;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031.
4. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uraian Tugas Jabatan Pada Pemerintah Kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu;
 - a. Dasar pertimbangan penentuan program dan kegiatan Dalam Renja Kecamatan Embaloh Hilir Tahun 2024, penentuan program dan kegiatan yang prioritas maupun non prioritas didasarkan atas pertimbangan – pertimbangan tertentu terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Embaloh Hilir. Program dan kegiatan yang dipilih dianggap dapat mengakomodir dan menunjang pencapaian tugas pokok

dan fungsi Kecamatan Embaloh Hilir, terutama yang berkaitan dengan program prioritas Rencana Pembangunan Daerah.

- b.** Rekapitulasi Program dan Kegiatan adapun program dan kegiatan Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi unsur kewilayahan Tahun 2024 dijabarkan dalam program dan kegiatan berikut ini :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima internal perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah hasil Penilaian APIP Indeks kepuasan pelayanan internal dengan metode survey
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja yang Disusun Tepat Waktu Tahun Berkenaan Dibagi Jumlah Seluruh Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja yang Disusun Tahun Berkenaan x 100 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra & Renja)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai SAP Tahun Berkenaan Dibagi Jumlah Seluruh Laporan Keuangan yang Disusun Tahun Berkenaan x 100 %
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Menurunnya pelanggaran disiplin pegawai perangkat daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	Jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun berkenaan dibagi Jumlah pelanggaran disiplin ASN tahun lalu x 100 %
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tercantum Dalam APBD Tahun Berkenaan Dibagi Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Direncanakan Dalam Renja Tahun Berkenaan x 100 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik perangkat daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang terealisasi tahun berkenaan (unit) dibagi Jumlah pengadaan barang milik daerah yang direncanakan dalam Renja tahun berkenaan (unit) x 100 %
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tercantum dalam APBD tahun berkenaan dibagi Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan dalam Renja tahun berkenaan x 100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

		Umum Kantor yang Disediakan	Kantor yang Disediakan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	Jumlah Barang Milik Perangkat Daerah yang Terpelihara Dengan Baik Tahun Berkenaan (unit) Dibagi Jumlah Seluruh Barang Milik Perangkat Daerah yang Ada Tahun Berkenaan (unit) x 100 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Embaloh Hilir	Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Embaloh Hilir	Jumlah Surat Keterangan atau Rekomendasi dan Lain- lain yang Dikeluarkan oleh Kecamatan Tahun Berkenaan/ Jumlah Permintaan Surat Keterangan Atau Surat Rekomendasi dan Lain-lain Dari Masyarakat yang Diterima Tahun Berkenaan x 100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Embaloh Hilir	Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Embaloh Hilir	Jumlah Sarana Prasarana Publik yang Dibangun Tahun Berkenaan (unit) / Jumlah Sarana dan Prasarana Publik yang Akan Dibangun Tahun Berkenaan (unit) x 100 %
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Embaloh Hilir	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Embaloh Hilir	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100%
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pasir Putih	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pasir Putih	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100%

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasir Putih	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasir Putih yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasir Putih yang Terbangun
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sinar bulan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sinar Bulan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Sinar Bulan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Sinar Bulan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Sinar Bulan yang Terbangun
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tembran	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tembran	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Tembran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Tembran yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Tembran yang Terbangun
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Semabung Lama	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Semabung Lama	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Semabung Lama	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Semabung Lama yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Semabung Lama yang Terbangun
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Air Mawar	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Air Mawar	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bacang	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bacang	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Bacang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Bacang yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Bacang yang Terbangun
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Air Itam	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Air Itam	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x

			100%
Pembangunan Sarana dan Prasarana	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Itam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Itam yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Itam yang Terbangun
PROGRAM MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terpenuhinya Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan yang Aktif / Jumlah Seluruh Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan x 100%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Embaloh Hilir	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Embaloh Hilir	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan dalam renja tahun berkenaan x 100%
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dikelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dikelurahan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pasir Putih	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Pasir Putih	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tembran	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Tembran	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tembran	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Tembran	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan Tembran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Tembran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Tembran
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Semabung Lama	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Semabung Lama	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan Semabung Lama	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Semabung Lama	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Semabung Lama
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Air Mawar	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun

		Air Mawar	berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan Air Mawar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Air Mawar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Air Mawar
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bacang	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Bacang	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan Bacang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Bacang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Bacang
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Air Itam	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Air Itam	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100%
Penyelenggaraan Lembaga Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan Air Itam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Air Itam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Air Itam
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Embaloh Hilir	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Tahun Berkenaan / Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Direncanakan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah sub kegiatan penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan penugasan kepala daerah yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi Jumlah sub kegiatan penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan penugasan kepala daerah yang direncanakan dalam Renja Tahun berkenaan x 100%
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal
		Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani	Jumlah permasalahan di masyarakat yang ditindaklanjuti tahun berkenaan / Jumlah permasalahan atau laporan pengaduan masyarakat yang terjadi tahun berkenaan x 100 %

PROGRAM PEMERINTAHAN PUBLIK	PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN			
		Meningkatnya waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah surat keluar dari PATEN yang dikeluarkan tepat waktu sesuai SOP tahun berkenaan / Jumlah seluruh surat keluar yang dikeluarkan PATEN tahun berkenaan x 100 %
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Embaloh Hilir	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Embaloh Hilir	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang direncanakan tahun berkenaan x 100%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Embaloh Hilir	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Embaloh Hilir	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang direncanakan tahun berkenaan x 100%
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan (PATEN)		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Pasir Putih	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Pasir Putih	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang direncanakan tahun berkenaan x 100%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Sinar Bulan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Sinar Bulan	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang direncanakan tahun berkenaan x 100%

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Temberan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Temberan	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang direncanakan tahun berkenaan x 100%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Semabung Lama	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Semabung Lama	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang direncanakan tahun berkenaan x 100%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Air Mawar	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Air Mawar	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang direncanakan tahun berkenaan x 100%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Bacang	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Bacang	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang direncanakan tahun berkenaan x 100%

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Air Itam	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Air Itam	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang direncanakan tahun berkenaan x 100%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Embaloh Hilir	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Embaloh Hilir	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat yang dilaksanakan tahun berkenaan Dibagi Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat yang direncanakan tahun berkenaan x 100%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Embaloh Hilir	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Embaloh Hilir	Jumlah Laporan atau Pengaduan dari Masyarakat yang Ditindaklanjuti Tahun berkenaan / Jumlah Laporan Atau Pengaduan yang Diterima Tahun Berkenaan x 100 %
Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan kepala daerah	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tahun berkenaan dibagi jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang direncanakan tahun berkenaan x 100%
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Embaloh Hilir Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN EMBALOH HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF TARGET	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN EMBALOH HILIR						2.116.577.801							2.198.368.800	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.116.577.801							2.198.368.800	
	7,01	KECAMATAN						2.116.577.801							2.198.368.800	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.899.477.801							1.983.253.800	
	07.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan perangkat Daerah (Dengan Satuan : laporan)				O/b	1.443.031.801	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir	Dana Trabsfer Umum – Dana Alokasi Umum					1.562.302.000	KECAMATAN EMBALOH HILIR
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: Orang /bulan)				14 O/b	1.351.351.801							1.463.182.000	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Laporan)				2 Dok	91.680.000							99.120.000	
	07.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Jumlah Paket Pakaian Dinas				Org/still	12.600.000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir	Dana Trabsfer Umum – Dana Alokasi Umum					12.600.000	KECAMATAN EMBALOH HILIR
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang Disediakan (Dengan Satuan : Stell)				21 Stell	12.600.000							12.600.000	

	07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan paket kegiatan perangkat Daerah (Dengan Satuan : laporan)				Laporan	108.537.500	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir	Dana Trabsfer Umum – Dana Alokasi Umum					125.991.000	KECAMATAN EMBALOH HILIR
	7.01.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)				1 Paket	4.056.000							4.557.000	
	7.01.01.2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)				1 Paket	2.475.000							2.400.000	
	7.01.01.2.06 05	Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)				1 Paket	3.336.500							2.984.000	
	7.01.01.2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan : Laporan)				1 Laporan	98.670.000							116.050.000	
	07.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan paket kegiatan perangkat Daerah (Dengan Satuan : laporan)				1 Laporan	11.500.000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir	Dana Trabsfer Umum – Dana Alokasi Umum					11.500.000	KECAMATAN EMBALOH HILIR
	7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dengan Satuan : Unit)				1 Unit	00,0							00,0	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan : Unit)				1 Unit	11.500.000							11.500.000	
	07.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan paket kegiatan perangkat Daerah (Dengan Satuan : laporan)				Laporan	275.778.000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir	Dana Trabsfer Umum – Dana Alokasi Umum					230.839.800	KECAMATAN EMBALOH HILIR
	7.01.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan				1 Paket	1.896.000							1.990.800,00	

			Satuan : Paket)													
	7.01.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)				1 Paket	10.530.040							10.530.092	
	7.01.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)				1 Laporan	263.351.960							218.318.908	
	07.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan paket kegiatan perangkat Daerah (Dengan Satuan : laporan)				Laporan	48.030.500	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir	Dana Trabsfer Umum – Dana Alokasi Umum					40.021.000	KECAMATAN EMBALOH HILIR
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan : Unit)				1 Unit	42.810.500							34.711.000,00	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:laporan)				1 Laporan	5.220.000							5.310.000	
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						9.600.000							9.600.000	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan :Laporan)				5 Laporan	9.600.000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir	Dana Trabsfer Umum – Dana Alokasi Umum					9.600.000	KECAMATAN EMBALOH HILIR
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)				Laporan	9.600.000							9.600.000	
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						207.500.000							207.500.000	

	7.01.03.2.02	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan di Kelurahan (Dengan Satuan : Lembaga Kemasyarakatan)				Lembaga	207.500.000	Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hilir	Dana Trabsfer Umum – Dana Alokasi Umum					207.500.000	KECAMATAN EMBALOH HILIR
	7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan di Kelurahan (Dengan Satuan : Lembaga Kemasyarakatan)				Lembaga	207.500.000							207.500.000	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kerengkapannya;	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut yang disediakan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor;	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;	Jumlah Komponen Peralatan Rumah Tangga yang disediakan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;	Jumlah Dokumen Barang Cetak dan Penggandaan arsip dokumen
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke SKPD;	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar/dalam Daerah
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan;	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya;	Jumlah Pengadaan Peralatan Laptop dan Printer
	Penyediaan Jasa surat menyurat;	Jumlah Dokumen Bermaterai
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;	Waktu Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional;	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara suratsuratnya / pembayaran Pajak
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;	Jumlah Pemeliharaan Laptot
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Publik	Cakupan Pelayanan Publik
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Terlaksanaannya Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Kelembagaan Desa dan Kecamatan
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga yang mendapat Stimulant Operasional Kegiatan.

BAB V

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Embaloh Hilir dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Kapuas Hulu di Kecamatan Embaloh Hilir.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) dikecamatan Embaloh Hilir- Ruang lingkup perencanaan Pembangunan dikecamatan Embaloh Hilir ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dan memperbaiki kejanggalan pada renja di awal tahun maka dilaksanakan Perubahan rencana Kerja (Renja) tahun 2024 pada triwulan II tahun berjalan, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Penetapan Status Hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekwensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis kesemua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi Renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan didalam Renstra yang sudah dibuat
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikator yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam arti semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi Renstra kesemua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan kearah yang sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan direncana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan

jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Perubahan Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat terwujud, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Amin.

Nanga Embaloh, 12 Desember 2023

CAMAT EMBALOH HILIR,




M.NASHARUDDIN, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19681128 199503 1 001

